ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Oleh
Maria Trisna Suryani[1], Aldarine Molidya[2], Rikhard T.C. Bolang[3]
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
E-mail: [1]mariatrisna16@gmail.com, [2]aldarine.molidya@staf.undana.ac.id, [3]rikhard.bolang@staf.undana.ac.id

Article History:
Received: 29-05-2025
Revised: 06-06-2025
Accepted: 02-07-2025

Keywords:
Implementasi Kebijakan, SIPD, BKAD, Van Meter dan Van Horn, Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai belum berjalan secara optimal, meskipun terdapat pemahaman yang cukup baik dari pelaksana terhadap tujuan SIPD. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi pengguna, serta gangguan teknis pada sistem SIPD. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas teknis SDM, peningkatan sarana prasarana, serta optimalisasi koordinasi lintas SKPD guna mendukung keberhasilan pelaksanaan SIPD di daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel*

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan seiring perkembangan zaman serta berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat salah satu tugas dan fungsi pemerintah

dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur pada pasal 280 ayat (1) dan (2) [1].

Pemerintah Indonesia menciptakan sistem informasi yang merupakan salah satu wujud dari penerapan Satu Data Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta dipertegas pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai *good governance*. Peraturan tersebut merupakan kebijakan baru yang diterbitkan menyangkut pelaksanaan dan penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan kualitas perencanaan anggaran secara efisien dan efektif.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan inovasi yang diterbitlan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 yang berlaku sejak 27 september 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan yang tertuang mengenai Sistem Informasi Manajeman Daerah (SIMDA). Hal tersebut dinilai perlu mengganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup informasi keuangan daerah, informasi pembangunan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya karena SIMDA belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. SIPD ini memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, selain itu sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan referensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah dan juga sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan dan defisit anggaran daerah dimana sistem ini diakses langsung oleh Pemerintah Pusat [2].

Badan pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manggarai sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2021 sampai sekarang. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaannya BKAD Kabupaten Manggarai menghadapi berbagai kendala seperti penggunaan SIPD yang belum berjalan secara optimal disebabkan oleh seringnya mengalami hambatan-hambatan teknis seperti proses migrasi data dari sistem lama ke SIPD memerlukan waktu dan upaya besar, terutama jika data yang ada tidak terstruktur dengan baik, khususnya dalam hal penatausahaan belanja daerah, serta kendala (*troubleshooting)* dalam penggunaannya, baik yang berasal dari sistem itu sendiri maupun dari segi pengguna *(user*), khususnya pada tingkat SKPD-SKPD terkait, karena dibutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian dalam penggunaannya [3].

SIPD diperkenalkan sebagai sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah, menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya digunakan. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai, masih

[1] (Tumija and Erlambang, 2023)
[2] (kemendagri, 2024)
[3] (Data.manggaraikab, 2021)

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan SIPD oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manggarai belum berjalan secara optimal. Proses migrasi data dari sistem lama ke SIPD masih menyisakan tantangan, terutama terkait dengan struktur data yang tidak seragam. Hambatan teknis seperti gangguan jaringan, kesalahan sistem *(troubleshooting*), dan kapasitas server juga sering kali terjadi, sehingga mengganggu proses input maupun akses informasi. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman dan kompetensi teknis aparatur, khususnya pada level SKPD, menyebabkan proses penyesuaian terhadap sistem ini berjalan lambat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dari penerapan SIPD dengan kondisi faktual di lapangan. SIPD yang seharusnya menjadi alat bantu strategis justru belum mampu sepenuhnya mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Realitas ini tidak hanya berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaporan anggaran, tetapi juga berisiko terhadap akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi SIPD untuk mengetahui sejauh mana sistem ini telah diadopsi secara efektif, apa saja hambatan utamanya, serta bagaimana strategi optimalisasi dapat dilakukan

Kabupaten Manggarai dipilih sebagai lokasi penelitian karena sedang berada pada fase adaptasi implementasi SIPD, dengan berbagai dinamika internal yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Manggarai menggunakan model Van Meter dan Van Horn, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang muncul di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih efektif di daerah, sekaligus memperkuat landasan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LANDASAN TEORI

Menurut [4] dalam bukunya *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Ripley dan Franklin dalam *Bureaucracy and Policy Implementation* berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit)*, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup rangkaian tindakan (atau tanpa tindakan) oleh banyak aktor yang dimaksudkan untuk program berjalan.

A Model of the Policy Implementation adalah model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975). Sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel adalah model proses implementasi ini. Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh variable-variabel yang saling berkaitan, secara rinci berbagai variabel tersebut yaitu:

[4] Winarno (2007)

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Diposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, serta visualisasi data dalam suatu organisasi. Sistem ini terdiri dari serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mengelola informasi sebagai sumber daya utama. Dalam era digital saat ini, sistem informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, kesehatan, dan pendidikan [5].

Sistem informasi dalam konteks pemerintahan merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel [6].

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah [7].

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah 10 APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)" [8].

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara [9].

Prinsip *good governance* dalam konsep pemerintah daerah adalah landasan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada

[5] (Gramedia, 2024)
[6] (Bkpsdmd.Babelprov, 2020)
[7] et al. Vitriana, 'Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru', *Digital Business Journal*, 1.1 (2022), p. 64, doi:10.31000/digibis.v1i1.6947.
[8] (Kalimandang, 2020)
[9] (Buleleng 2020)

masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melayani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan standar etika, keadilan, dan hukum, serta berorientasi pada kepentingan publik. *Good governance* berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga seluruh sumber daya dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan dengan maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat [10].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan adalah metode penelitian yang, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatis, dan hasil menelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Keuangan Aset daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai.Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil Observasi, wawancara, diskusi yang akan dilakukan oleh peneliti di kantor BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Manggarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

1. Standar dan sasaran kebijakan

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, maka standar dan tujuannya harus dirumuskan secara jelas, konsisten, serta dapat dipahami dan diterapkan oleh pelaksana di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai telah ditetapkan secara normatif dan telah dipahami oleh pelaksana utama. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan dasar hukum yang mengacu pada Permendagri No. 70 Tahun 2019, serta upaya pemerintah daerah dalam menerjemahkan regulasi pusat ke dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan bupati. Selain itu, struktur hak akses dalam sistem SIPD telah disesuaikan dengan jabatan dan unit kerja, yang menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan, standar pelaksanaan sudah diarahkan ke dalam bentuk operasional yang konkret.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal jika dilihat dari pemanfaatan seluruh fitur dalam sistem SIPD. Temuan menunjukkan bahwa beberapa modul, seperti penatausahaan dan pelaporan, belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kebijakan yang telah ditetapkan dan kemampuan pelaksana dalam menerapkannya secara teknis di lapangan. Dalam kerangka

[10] (Kemenkeu, 2023)

Van Meter dan Van Horn, hal ini menandakan bahwa meskipun standar telah tersedia, pelaksana belum sepenuhnya mampu mewujudkan seluruh komponen kebijakan dalam praktik kerja mereka.

Dapat disimpulkan bahwa, implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari sisi standar dan sasaran kebijakan telah memiliki landasan hukum dan pemahaman yang kuat di tingkat pelaksana utama. Namun, implementasinya belum optimal secara teknis**,** karena belum semua modul SIPD digunakan sepenuhnya, terutama penatausahaan dan pelaporan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan operasional melalui penyusunan SOP teknis, pelatihan internal, dan pendampingan terstruktur agar sasaran digitalisasi keuangan daerah dapat tercapai sepenuhnya.

2. Sumber Daya

Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn, sumber daya mencakup segala hal yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Ini meliputi ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, peralatan, informasi, dan waktu. Tanpa dukungan sumber daya yang optimal, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek sumber daya belum berjalan secara optimal. Meskipun secara teknis infrastruktur jaringan internet telah tersedia dengan baik bahkan hingga ke tingkat kecamatan, hal ini belum diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Para pelaksana SIPD di BKAD sebagian besar tidak menerima pelatihan formal dari pemerintah daerah, sehingga keterampilan mereka dalam mengoperasikan sistem SIPD diperoleh secara mandiri, melalui inisiatif belajar dari video daring, membaca panduan online, atau praktik langsung. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan kemampuan antarpegawai, yang berdampak pada ketidakkonsistenan dalam pengoperasian sistem.

implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek sumber daya belum optimal, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan. Infrastruktur jaringan memang sudah tersedia dengan baik, namun belum adanya pelatihan formal, dukungan anggaran, dan kebijakan penguatan SDM menjadi hambatan utama yang harus segera ditangani agar implementasi SIPD dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn, sumber daya mencakup segala hal yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Ini meliputi ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, peralatan, informasi, dan waktu. Tanpa dukungan sumber daya yang optimal, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek sumber daya belum berjalan secara optimal. Meskipun secara teknis infrastruktur jaringan internet telah tersedia dengan baik bahkan hingga ke tingkat kecamatan, hal ini belum diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Para pelaksana SIPD di BKAD sebagian besar tidak menerima pelatihan formal dari pemerintah daerah, sehingga keterampilan mereka dalam mengoperasikan sistem SIPD diperoleh secara mandiri, melalui inisiatif belajar dari video daring, membaca panduan online, atau praktik langsung. Kondisi

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

ini menyebabkan kesenjangan kemampuan antarpegawai, yang berdampak pada ketidakkonsistenan dalam pengoperasian sistem.

implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek sumber daya belum optimal, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan. Infrastruktur jaringan memang sudah tersedia dengan baik, namun belum adanya pelatihan formal, dukungan anggaran, dan kebijakan penguatan SDM menjadi hambatan utama yang harus segera ditangani agar implementasi SIPD dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BKAD juga telah menjalankan perannya sebagai koordinator utama pelaksanaan SIPD di lingkungan pemerintah daerah. BKAD membimbing dan mengarahkan SKPD lain dalam penggunaan SIPD, terutama dalam hal pengisian data dan alur kerja sistem. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman teknis antara BKAD dan SKPD lainnya.

implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek Karakteristik organisasi pelaksana telah optimal secara internal**,** khususnya dalam hal struktur dan pembagian wewenang digital di lingkungan BKAD. Namun dari sisi eksternal, yaitu keterpaduan antarlembaga, implementasi masih belum optimal karena belum semua SKPD memiliki kapasitas teknis dan komitmen yang sama dalam menjalankan sistem. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi lintas unit dan pemerataan kapasitas teknis di seluruh SKPD menjadi prioritas untuk mewujudkan pelaksanaan SIPD yang optimal secara menyeluruh.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan kerangka teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi merupakan elemen penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang optimal ditandai dengan adanya alur informasi yang jelas, responsif, dan konsisten antara pembuat kebijakan, pelaksana utama, serta unit-unit pelaksana lainnya. Baik komunikasi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar unit daerah) harus berjalan efektif agar pelaksanaan kebijakan tidak terhambat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi horizontal antara BKAD sebagai pelaksana utama dengan SKPD lainnya telah berjalan relatif baik. BKAD menjalankan peran sebagai koordinator teknis, membimbing SKPD lain dalam proses pengisian dan pengelolaan data melalui SIPD. Adanya peran pengawasan dan arahan dari BKAD memperlihatkan bahwa struktur koordinasi internal telah dibangun, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman teknis di antara perangkat daerah.

Namun, komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum berjalan optimal, terutama terkait penanganan kendala teknis dalam penggunaan SIPD. Respons pemerintah pusat terhadap permasalahan yang dialami daerah, seperti error sistem atau perubahan alur input data, cenderung lambat. Meskipun telah tersedia kanal komunikasi seperti grup *WhatsApp* dan *Helpdesk,* efektivitasnya masih terbatas karena tidak selalu mendapatkan tanggapan yang cepat dan solutif. Akibatnya, banyak pelaksana di daerah yang harus mencari solusi sendiri melalui forum tidak resmi atau pengalaman pribadi.

Implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek Komunikasi antarorganisasi telah berjalan optimal pada tingkat internal (horizontal)**,** khususnya antara BKAD dan SKPD. Namun, komunikasi vertikal antara daerah dan pusat masih belum optimal**,**

terutama dalam hal respon terhadap kendala teknis dan pembaruan sistem. Pemerintah pusat perlu membangun sistem komunikasi yang lebih responsif, terdokumentasi, dan proaktif agar pelaksanaan SIPD di daerah dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan.

5. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, disposisi atau sikap pelaksana mengacu pada sejauh mana para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman, kemauan, dan komitmen untuk menjalankan kebijakan. Meskipun struktur organisasi dan kebijakan sudah tersedia, tanpa sikap pelaksana yang mendukung, implementasi akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai ditopang oleh disposisi pelaksana yang kuat dan responsif terhadap kebijakan digitalisasi. Meskipun sebagian besar pelaksana tidak mendapatkan pelatihan formal dari pemerintah daerah, mereka menunjukkan komitmen dan antusiasme tinggi untuk memahami dan menjalankan sistem. Pelaksana bersedia belajar secara mandiri dengan mengakses berbagai sumber daring seperti video tutorial, dokumen petunjuk, hingga bertanya kepada rekan kerja yang lebih dulu memahami sistem.

Selain itu, pelaksana menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan, meskipun sistem SIPD masih terus mengalami penyempurnaan. Mereka menyesuaikan diri dengan dinamika sistem dan menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi kendala teknis yang muncul. Keinginan untuk terus beradaptasi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan kelembagaan masih terbatas, pelaksana tetap menjalankan tugasnya dengan motivasi dan tanggung jawab pribadi yang tinggi.

Implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek disposisi pelaksana telah berjalan secara optimal. Pelaksana menunjukkan sikap positif, terbuka terhadap sistem baru, dan memiliki motivasi tinggi untuk menyesuaikan diri secara mandiri. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menopang keberhasilan kebijakan, meskipun dukungan struktural dan pelatihan formal dari pemerintah daerah masih belum tersedia.

6. Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi

Berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, dukungan politik, serta kapasitas fiskal daerah sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan mempercepat proses adopsi kebijakan, sementara lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penghambat yang signifikan, meskipun kebijakan dan struktur pelaksananya telah disiapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan sosial dan teknologi, pelaksanaan SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai mendapat dukungan yang relatif memadai. Infrastruktur jaringan internet telah tersedia hingga ke tingkat kecamatan, sehingga dari sisi aksesibilitas teknologi, pelaksanaan sistem tidak mengalami hambatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial dan teknis, kondisi eksternal di daerah sudah cukup mendukung proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Namun, dari sisi lingkungan politik dan ekonomi, pelaksanaan SIPD masih menemui hambatan yang menyebabkan implementasi belum berjalan optimal. Hingga saat penelitian dilakukan, pemerintah daerah belum menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan atau

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

penguatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan SIPD. Selain itu, belum terdapat kebijakan afirmatif dari kepala daerah yang secara khusus mendorong percepatan dan konsistensi pelaksanaan sistem ini. Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa secara kelembagaan, SIPD belum menjadi prioritas politik yang kuat di daerah.

Dapat disimpulkan bahwa, implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dari aspek lingkungan sosial dan teknologi, telah didukung oleh infrastruktur jaringan yang memadai, yang memungkinkan pelaksana mengakses sistem dengan baik. Namun dari sisi lingkungan politik dan ekonomi, pelaksanaan belum berjalan optimal karena minimnya dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Untuk mewujudkan implementasi SIPD yang optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen politik dan dukungan fiskal yang nyata sebagai bentuk penguatan kelembagaan di tingkat lokal.

Kendala yang dihadapi BKAD Kabupaten Manggarai dalam implementasi SIPD

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Manggarai mencerminkan dinamika yang umum terjadi dalam proses digitalisasi administrasi pemerintahan di daerah. Meskipun SIPD dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaannya di BKAD Kabupaten Manggarai masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan.

1. **Minimnya pelatihan dan sosialisasi**

   Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan kepada pegawai. Proses pengenalan SIPD hanya dilakukan kepada segelintir orang saat awal penerapan, sementara pegawai lain dituntut untuk belajar secara mandiri. Ini berdampak pada rendahnya pemahaman teknis dan operasional terhadap sistem tersebut.
2. **Kendala teknis dan respons lambat**

   Kendala teknis masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Baik dari sisi sistem (misalnya error atau gangguan akses) maupun dari segi kapasitas pengguna, sering terjadi masalah yang tidak bisa segera diselesaikan karena lambatnya respon dari pemerintah pusat.
3. **Pemanfaatan fitur SIPD yang belum optimal**

   Walaupun fitur penganggaran telah dimanfaatkan secara penuh, fitur-fitur lain seperti penatausahaan dan pelaporan belum berjalan maksimal. Hal ini mengindikasikan belum meratanya penguasaan dan penerapan semua komponen dalam SIPD. Penyebabnya bisa bersumber dari aspek teknis sistem, keterbatasan kapasitas SDM, maupun dari lemahnya supervisi dalam penerapan menyeluruh sistem tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manggarai, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai telah menunjukkan kemajuan dan capaian yang optimal pada beberapa aspek penting, seperti pemahaman pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan, struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan digitalisasi, disposisi atau sikap pelaksana yang adaptif dan mandiri, serta

ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang sudah menjangkau hingga ke tingkat kecamatan. Namun, secara keseluruhan, pelaksanaan SIPD belum sepenuhnya optimal**,** khususnya dalam pemanfaatan seluruh modul SIPD, seperti penatausahaan dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, belum adanya SOP teknis dan pengawasan terstandar juga menyebabkan ketidakkonsistenan implementasi antarunit kerja. Oleh karena itu, implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai dapat dikategorikan telah berada pada jalur yang benar, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis, kelembagaan, dan sistem koordinasi agar dapat mencapai optimalisasi secara menyeluruh.

2. Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Manggarai turut menjadi faktor penghambat tercapainya pelaksanaan yang optimal. Kendala tersebut meliputi: belum tersedianya pelatihan teknis secara resmi, perubahan sistem SIPD yang sering terjadi tanpa panduan, respon lambat dari pemerintah pusat terhadap permasalahan teknis, serta tidak adanya kebijakan daerah maupun alokasi anggaran khusus yang mendukung penguatan kapasitas pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD bukan hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga hambatan struktural dan kelembagaan yang perlu ditangani secara komprehensif. Tanpa intervensi kebijakan yang sistematis dari pemerintah daerah maupun dukungan teknis yang responsif dari pusat, maka potensi untuk mencapai pelaksanaan SIPD yang optimal akan sulit terwujud sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bkpsdmd.Babelprov, ‘Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan’, *Bkpsdmd.Babelprov,* 2020
[2] buleleng, ‘Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia’, *Buleleng*, 2020
[3] Data.manggaraikab, ‘Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021’, *Data.Manggarakab,* 2021
[4] Gramedia, ‘Pengertian Sistem Informasi: Tujuan Dan Komponennya’, *Gramedia,* 2024
[5] Kalimandang, Paul A.U.S., ‘Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017’, 2020, pp. 9–31
[6] kemendagri, ‘Pertanyaan Seputar SIPD’, *Kemendagri,* 2024
[7] Kemenkeu, ‘5 (Lima) Prinsip Good Governance Dalam Pengurusan Piutang Negara’, *Kemenkeu,* 2023
[8] Tumija, Tumija, and Prayoga Arif Erlambang, ‘Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan’, *Jurnal Media Birokrasi*, 2023, pp. 155–69, doi:10.33701/jmb.v5i2.3696
[9] Vitriana, et al., ‘Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru’, *Digital Business Journal*, 1.1 (2022), p. 64, doi:10.31000/digibis.v1i1.6947
[10] Winarno, Budiono, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Media Pressindo, 2007)

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)